

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbandingan Penelitian dengan Obyek Kajian Tindak Pidana Korupsi	13
Tabel 2.	Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Persidangan Beberapa Negara	45
Tabel 3.	Indikator Nilai Keadilan	94
Tabel 4.	<i>Traditional and Restorative Justice</i>	154
Tabel 5.	<i>Sanctions for legal persons</i>	222
Tabel 6.	Perbandingan Kriteria-kriteria Kepentingan Publik	229
Tabel 7.	Pertimbangan Putusan Kasasi Perkara Korupsi Yang Bersifat Ringan.	301
Tabel 8.	Perbandingan Sistem Penuntutan, Asas-asas penuntutan, dan fungsi penuntut umum.	310

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PROMOTOR DAN KOPROMOTOR	iv
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I	v
PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH DISERTASI	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
RINGKASAN.....	xii
SUMMARY	xix
ABSTRACT	xxv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xxviii
DAFTAR TABEL.....	xxix
DAFTAR ISI	xxx
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	11
1.3 Manfaat Penelitian.....	11
1.4 Orisinalitas Penelitian.....	12
1.5 Kerangka Teoritik.....	17

1.6	Metode Penelitian.....	52
1.7	Sistematika Penulisan.....	58
BAB II	FILOSOFI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERSIFAT RINGAN DI LUAR PERSIDANGAN.....	60
2.1	Ontologi, Epistemologi, dan aksiologi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan di Luar persidangan.....	60
2.2	Komparasi Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Bersifat Ringan di Luar Persidangan di Beberapa Negara.....	165
2.3	Karakteristik Tindak Pidana Korupsi Yang Bersifat Ringan...	196
BAB III	PENGEMBANGAN ASAS KELAYAKAN (<i>EXPEDIENCY</i>) SEBAGAI LANDASAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERSIFAT RINGAN DI LUAR PERSIDANGAN.....	206
3.1	Pengaturan Konsep Kepentingan Publik dalam Asas Kelayakan di Beberapa Negara.....	206
3.2.	<i>Ratio Decidendi</i> Beberapa Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Bersifat Ringan.....	231
3.3	Pengembangan Asas Kelayakan Berupa Kebijakan dan Perwujudan Normanya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	307

BAB IV. PENUTUP.....	341
4.1 Kesimpulan.....	341
4.2 Saran.....	343
 DAFTAR BACAAN	 xxxiii